

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN*THE FINANCIAL ANALYSIS OF GOVERNMENT OF SOUTH MINAHASA DISTRICT*

Oleh :

Mega Oktavia RopaFakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail : Megaropa@yahoo.co.id

Abstrak: Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai rasio, diantaranya rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, dan juga melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan daerah.

Kata kunci : *kinerja keuangan, efektivitas, efisiensi, kemandirian, pertumbuhan*

Abstract: *The performance of a government body can be observed through the Financial performance of a particular region. One such method of analysing is by analysing the ratio in which Regional Revenue and Expenditure Budget is planned and executed. Financial performance analysis can be done through several rates including effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of local financial independence, the activity ratio, and growth ratio. The purpose of this research is to Know the Financial Performance of the Government of South Minahasa regency. This type of research is a descriptive study using ratio analysis method. The results showed that, the ratio of effectiveness can be considered effective, the efficiency ratio is less efficient, independence ratio of financial management is still low, the activity ratio is not good, and the ratio of good growth, for growth of local revenues and earnings, and unfavorable for the growth of recurrent expenditure and development spending. Thus, the performance of the financial management of South Minahasa regency based financial ratio analysis is quite good. South Minahasa District Government is expected to further improve local revenues, and also do the priorities in the area of budgetary expenditure.*

Keywords: *financial performance, effectiveness, efficiency, independence, growth*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan Daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif, efisien, dan mandiri. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:18) mengatakan akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi sektor publik termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit

pemerintah dan organisasi non profit lainnya, seperti mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. (Mentu 2016).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Rasdianto (2013:6) mengatakan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah. Renyowijoyo (2011:77) mengatakan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (provinsi, kabupaten, kota) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah di banyak negara, dibutuhkan untuk mempromosikan sistem manajemen yang baik yang akan bekerja ke arah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang tepat yang hanya dapat diwujudkan melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien (Aramide dan Bashir 2015).

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mengatakan laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Rondonuwu 2015).

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

1. Indikator Masukan
2. Indikator Proses
3. Indikator Keluaran
4. Indikator Hasil
5. Indikator Manfaat
6. Indikator Dampak

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan Kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi.

1. Rasio Efektivitas

Rahardjo (2011:170) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016:140) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu dapat diukur sebagai rasio output terhadap input. Faud (2016:140) mengatakan efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Faud (2016:138) mengatakan rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

4. Rasio Aktifitas

Secara umum aktifitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengetahui potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Penelitian Terdahulu

Fidelius (2013) dalam penelitian yang berjudul Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah kota manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio kemandirian kota manado masih sangat rendah, rasio efektifitas cukup efektif, rasio aktifitas pemerintah kota

manado memprioritaskan dananya pada belanja operasi. Rasio pengelolaan belanja sudah sangat. PAD dan Pendapatan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sedangkan rasio pertumbuhan belanja operasi masih sangat tinggi dibandingkan rasio pertumbuhan belanja modal. Pangkey (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk periode anggaran 2010-2014. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang di butuhkan guna memecahkan masalah yang ada sesuai dengan Tujuan Penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Lingkungan XII. Adapun penelitian ini dimulai dari Bulan Mei 2016 sampai Bulan Juni Tahun 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan penelitian
Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi yaitu Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
3. Peninjauan langsung (observasi), yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung ke lokasi tempat penelitian.
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis Rasio Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai fakta-fakta melalui perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Efektivitas

Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Efisiensi

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemandirian

Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Aktifitas

Aktifitas Keuangan Daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan antara total belanja rutin/operasi dengan total APBD dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Dan total belanja pembangunan dengan APBD dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Pertumbuhan

Pertumbuhan keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan total pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan belanja rutin/belanja operasi} = \frac{\text{Belanja rutin tahun } p - \text{belanja rutin tahun } p-1}{\text{Belanja rutin tahun } p-1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan belanja pembangunan/belanja modal} = \frac{\text{Belanja pembangunan tahun } p - \text{belanja pembangunan tahun } p-1}{\text{Belanja pembangunan tahun } p-1} \times 100\%$$

(Keterangan: p = tahun yang dihitung, $p-1$ = tahun sebelumnya)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara $0^{\circ},47'$ - $1^{\circ},24'$ Lintang Utara dan $124^{\circ},18'$ - $124^{\circ},45'$ Bujur Timur. Batas wilayahnya :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Barat : Berbatasan Dengan Laut Sulawesi

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014.

Hasil Penelitian

1. Rasio Efektivitas

Tabel 1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Persentase
2011	Rp.515.891.352.257,00	Rp.519.322.927.489,00	99,33%
2012	Rp.537.329.647.572,00	Rp.535.044.213.864,00	100,42%
2013	Rp.604.614.969.408,00	Rp.601.087.914.509,00	100,58%
2014	Rp.684.371.721.501,00	Rp.690.625.976.980,00	99,94%

Sumber data : data diolah (2016)

2. Rasio Efisiensi

Tabel 2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Belanja	Realisasi Penerimaan	Persentase
2011	Rp.483.807.278.567,00	Rp.515.891.352.257,00	93,78%
2012	Rp.525.891.166.484,00	Rp.537.329.647.572,00	97,87%
2013	Rp.561.242.693.084,00	Rp.604.614.969.408,00	92,82%
2014	Rp.689.167.009.246,38	Rp.684.371.721.501,00	100,70%

Sumber data : data diolah (2016)

3. Rasio Kemandirian

Tabel 3. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Persentase
2011	Rp.9.407.280.004,00	Rp.506.484.072.253,00	18,57%
2012	Rp.10.620.087.945,00	Rp.526.709.559.627,00	20,16%
2013	Rp.14.406.092.809,00	Rp.590.208.876.699,00	24,40%
2014	Rp.26.137.234.620,00	Rp.654.665.686.881,00	39,92%

Sumber data : data diolah (2016)

4. Rasio Aktifitas

Tabel 4. Aktifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	APBD	Belanja		Rasio Aktifitas belanja (%)	
		Operasi	Modal	Operasi	Modal
2011	Rp.483.672.278.567,00	Rp.399.282.253.916,00	Rp.84.390.024.651,00	82,55	17,44
2012	Rp.525.881.166.484,00	Rp.418.336.693.544,00	Rp.107.544.472.940,00	79,54	20,45
2013	Rp.561.212.693.084,00	Rp.458.745.129.615,00	Rp.102.467.563.469,00	81,74	18,25
2014	Rp.689.167.009.246,38	Rp.556.213.835.443,38	Rp.132.953.173.803,00	80,70	19,29

Sumber data : data diolah (2016)

5. Rasio pertumbuhan

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
2012	12,89%	4,15%	4,77%	27,43%
2013	35,64%	12,52%	9,65%	-4,72%
2014	81,43%	13,19%	21,24%	29,75%

Sumber data : data diolah (2016)

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Pengelolaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014

Keterangan	Tahun Anggaran				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Rasio Efektivitas	99,33%	100,42%	100,58%	99,94%	100,06%
Rasio Efisiensi	93,78%	97,87%	92,82%	100,70%	96,29%
Rasio Kemandirian	18,57%	20,16%	24,40%	39,92%	25,76%
Rasio Aktivitas					
-Belanja Operasi	82,55%	79,54%	81,74%	80,70%	81,13%
- Belanja Modal	17,44%	20,45%	18,25%	19,295	18,85%
Rasio pertumbuhan					
- PAD	-	12,89%	35,64%	81,43%	43,32%
- Pendapatan Daerah	-	4,15%	12,52%	13,19%	9,95%
- Belanja Operasi	-	4,77%	9,65%	21,24%	11,88%
- Belanja Modal	-	27,43%	-4,72%	29,75%	17,48%

Sumber data : data diolah (2016)

Pembahasan

Tabel 6 menunjukkan bahwa rasio efektivitas Kabupaten Minahasa Selatan memperlihatkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 99,33% dimana realisasi penerimaan lebih kecil dengan target yang ditetapkan, tahun 2012 meningkat menjadi 100,42% dimana realisasi penerimaan lebih besar dengan target yang telah ditetapkan, tahun 2013 sebesar 100,58% dimana realisasi penerimaan lebih besar dengan target yang telah ditetapkan, dan tahun 2014 sebesar 99,94% realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi pada tahun 2011 sebesar 93,78%, tahun 2012 sebesar 97,87%, tahun 2013 sebesar 92,82%, tahun 2014 sebesar 100,70%. Sehingga rasio efisiensi dari tahun anggaran 2011-2014 berada pada tingkat rata-rata 96,29%, sehingga bisa dikategorikan kurang efisien.

Untuk rasio kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Selatan selama empat tahun anggaran berada pada tingkat rata-rata 25,76%, sehingga bisa dikategorikan rendah. Ini berarti bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan terhadap APBD masih kecil dibandingkan peran dari pemerintah pusat/provinsi yang masih sangat besar dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat/provinsi masih sangat besar, pemerintah daerah belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.

Rata-rata rasio aktifitas belanja Kabupaten Minahasa Selatan untuk belanja operasi (belanja rutin) sebesar 81,13%, sedangkan rasio aktifitas belanja modal (belanja pembangunan) sebesar 18,85%, rasio aktifitas belanja operasi Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat tinggi dibandingkan rasio aktifitas belanja modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, itu berarti semakin kecil pula dan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Rasio pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun anggaran 2012-2014 menunjukkan pertumbuhan yang baik, dimana setiap tahun menunjukkan peningkatan yang baik. Pada tahun 2012 rasio pertumbuhan PAD sebesar 12,89%, dan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 4,15%, pada tahun 2013 sebesar 35,64% dan 12,52%, pada tahun 2013 sebesar 81,435 dan 13,39%.

Pertumbuhan belanja yaitu belanja operasi yang setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2012 sebesar 4,77%, tahun 2013 sebesar 9,65% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 21,24%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2012 sebesar 27,43%, pada tahun 2013 pertumbuhan belanja modal kurang baik, karena dimana pada tahun 2012 turun menjadi -4,72%, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 29,75%.

Fidelius (2013) dari hasil perhitungan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado tahun anggaran 2010-2012 memperlihatkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 rasio efektivitas sebesar 70,91%, tahun 2011 sebesar 82,34%, dan pada tahun 2012 sebesar 100,26%. Rasio kemandirian selama tiga tahun berada pada tingkat rata-rata 15,22%, sehingga dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25%), ini berarti bahwa kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil, dan peran dari pemerintah pusat masih sangat besar. Rata-rata rasio aktifitas belanja operasi sebesar 80,07%, sedangkan rasio aktivitas belanja modal sebesar 16,18%, rasio aktifitas belanja operasi kota Manado sangat tinggi dibandingkan dengan rasio aktifitas belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan PAD dan Pendapatan Kota Manado tahun anggaran 2010-2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama pada tahun 2011 sebesar 48,33%, rasio pertumbuhan belanja kota Manado untuk belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan rasio pertumbuhan untuk belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 bisa dikategorikan Efektif. Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 Kurang Efisien.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2011-2014 masih Rendah, Pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri..
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan aktifitas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2011-2014 masih rendah karena Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin/operasi dibandingkan untuk belanja pembangunan/modal.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan, sedangkan untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan masih kurang baik.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Tingkat efektivitas terus dipertahankan seperti saat ini, Realisasi penerimaan daerah harus lebih besar dengan target yang ditetapkan.
2. Pendapatan asli daerah terus ditingkatkan walaupun jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih cukup besar.
3. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat meminimalisasikan anggaran daerahnya untuk belanja rutin, dan dapat mengalokasikan anggaran daerahnya untuk belanja pembangunan, agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faud Ramli Muhammad, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Fidelius, 2013, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3418> Diakses 16 Oktober 2015. Hal. 2088-2096.
- Kementrian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

- Mentu Paula Ezra, 2016, Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov.Sulut. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 1 ISSN 2303-1174 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359> Diakses 1 Maret 2016. Hal. 1392-1399.
- Pangkey Imanuel, 2015, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581> Diakses tanggal 8 Januari 2016. Hal. 33-43.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rasdianto Erlina, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat. Jakarta.
- Renyowijoyo Maindro, 2011, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rondonuwu Ritno, 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580> Diakses Desember 2015, Hal. 23-32.
- Aramide Sanusi Fasilat, Bashir Musthapa Muhammad, 2015. The Effectiveness of internal system and financial at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Bussiness Management (IMPACT : IJRBM)*. Vol. 3, Issue 8, Aug 2015, 1-6 ISSN (E) : 2321-886X ; ISSN (P) 2347-4527.
- Sujarweni Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.